

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target Millenium Development Goals (*MDGs*) dalam sub sektor air minum dan sanitasi. Dalam rangka meningkatkan akses penduduk dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi, pemerintah mengimplementasikan kebijakan maupun program pembangunan yang menyokong kebutuhan masyarakat akan air bersih. Melihat dari kondisi Indonesia saat ini dimana masih banyak wilayah yang mengalami kekurangan pasokan air bersih. Tingginya angka penyakit seperti kecacangan dan penyakit kulit menjadi salah satu akibat dari tidak terpenuhinya standar kualitas dan kuantitas air minum yang aman dan layak untuk dikonsumsi¹. Sementara itu kesehatan adalah hak semua manusia yang mana di Indonesia, kesehatan sebagai hak asasi manusia secara tegas diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dimana dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan akan kesehatan². Dalam hal ini air sebagai kebutuhan dasar makhluk hidup di muka bumi ini memegang peran penting dalam menegakkan hidup bersih dan menunjang kesehatan

¹ Elysia, Vita. Air dan Sanitasi: Dimensi Posisi Indonesia. 2020

² <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> diakses pada 12 Oktober 2022

masyarakat. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa capaian akses air bersih yang layak saat ini di



Indonesia mencapai 72,55 persen. Angka tersebut masih dibawa target Sustainable Development Goals(SDGs) yakni sebesar 100 persen³. SDGS merupakan bentuk penyempurnaan dari MDGS yang lebih kompherensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun negara berkembang. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGS yaitu 49 dari 67 indikator MDGS.

Target-target pencapaian SDGs di Indonesia sejalan dengan RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program. Menyikapi permasalahan angka akses air minum yang masih rendah, Pemerintah Nasional memberikan perhatian serius terhadap permasalahan tersebut sebagaimana tercermin dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang menetapkan target 100% akses air minum bagi seluruh masyarakat dengan memperhatikan aspek aksibilitas air minum sebagai berikut⁴ :

Tabel 1. 1

Empat aspek akseibilitas air minum layak menurut RPJMN 2015-2019

Komponen	Penjelasan
Kuantitas	Air dapat memenuhi kebutuhan konsumsi (makan, minum, masak) dan higienis minimal 60 liter/hari Air dapat memenuhi kebutuhan dasar (makan dan minum) minimal 15 liter/hari
Kualitas	Sumber air terlindungi diasumsikan hanya 1 kali pengolahan. Sumber air antara lain air perpipaan, sumur bor, sumur gali terlindungi, mata air, dan air hujan

³ <https://www.suara.com> diakses pada 22 Februari 2023

⁴ Hardianto, Ferandya Yoedhiandito. Mewujudkan Akseibilitas Air Minum dan Sanitasi yang Aman dan Berkelanjutan Bagi Semua. CV Dharma Putra. 2015

Kontinuitas	Air dapat diperoleh setiap saat (24 jam)
Keterjangkauan	Air dapat dijangkau dengan waktu maksimal 30 menit untuk setiap pengambilan (pulang pergi) Harga air terjangkau yang tidak melebihi 4% dari total pendapatan rumah tangga/bulan

Sumber: Aksibilitas air minum layak menurut RPJMN 2015-2019

Berdasarkan tabel diatas, pemenuhan kebutuhan air sudah semestinya menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, yang mana pencapaian target aksesibilitas bagi seluruh masyarakat membutuhkan kerja keras dari pemerintah agar tersebar secara merata. Keberlanjutan dari suatu pembangunan juga tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Tuntutan akan pemenuhan akses air bersih juga tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS). Berdasarkan pilar ke-6 SDGS menyatakan bahwa setiap orang dimuka bumi harus memiliki akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau⁵. Dalam hal ini pemerintah sebagai platform penyelenggara pembangunan harus menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ketersediaan air bersih dan sanitasi yaitu dengan Program Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Pamsimas merupakan

⁵ Boge Triatmanto.2021. Menggagas Percepatan Pencapaian SDGs. Selaras media kreasindo

platform pembangunan air minum dan sanitasi yang mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya. Saat ini program Pamsimas merupakan salah satu program unggulan dan terbesar yang berkontribusi dalam pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi di Indonesia. Sebagai program yang menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai kunci utama sekaligus penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Adapun program ini didukung oleh unit pengelola program ditingkat pusat dan daerah, konsultan, serta fasilitator.

Pamsimas yang dilaksanakan sejak Tahun 2008 hingga saat ini telah banyak memberikan dampak positif dalam rangka mencukupi kebutuhan air minum, sanitasi dan perubahan perilaku kesehatan yang tersebar di Kabupaten/Kota di Indonesia. Implementasi program Pamsimas pada Tahun 2008-2012 telah berhasil meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan dan pinggiran kota serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat . Program lanjutan Pamsimas di Tahun 2013-2016 diagendakan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan yaitu air bersih untuk rakyat dan sanitasi total berbasis masyarakat. Adapun pelaksanaan Pamsimas ditahun 2022 merupakan bentuk program yang mendukung dimensi pembangunan berkelanjutan⁶.

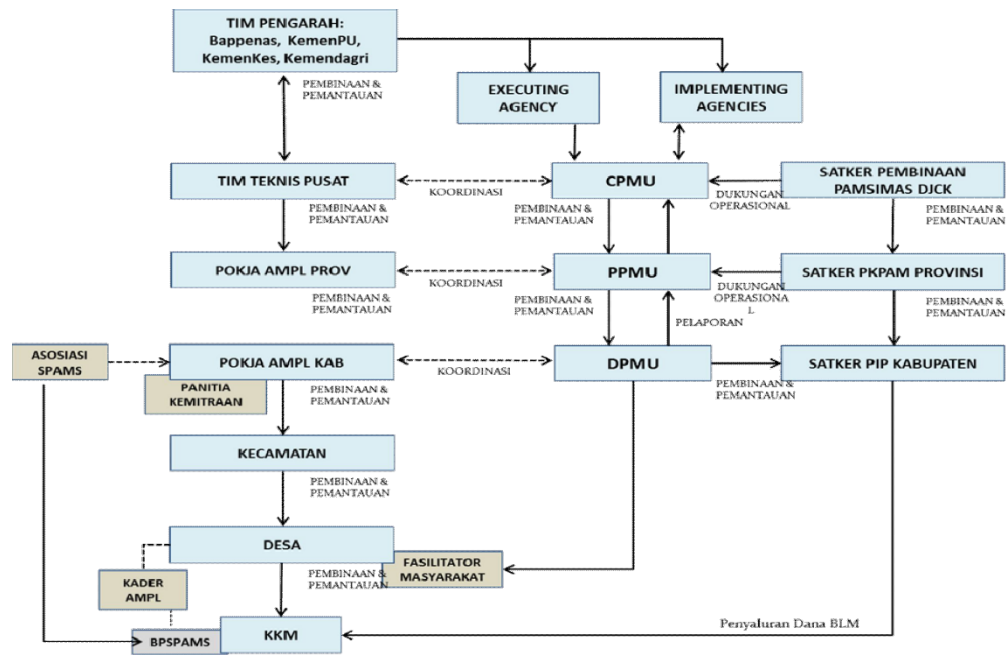
⁶ Muhammad Qomaruddin dkk. 2017. Pemanfaatan Air Bersih Masyarakat pada Program Pamsimas di Desa Raguklampitan Kabupaten Jepara. Jurnal Jepara:UNISNU

Mengupas berita terkait Pamsimas, saat ini capaian program ini telah berhasil memberikan kontribusi kepada 23,57 juta jiwa dan sanitasi kepada 16,44 juta jiwa yang tersebar di 33 Provinsi, 408 Kabupaten/Kota dan lebih dari 35.000 desa⁷. Program ini diharapkan menjadi alternatif dalam pemenuhan sumber air bersih bagi masyarakat serta dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/*SDGs*.

Melalui Pedoman petunjuk pelaksanaan Pamsimas menyebutkan bahwa Program Pamsimas berperan menyediakan dukungan financial baik untuk investasi fisik berupa sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik berupa manajemen, dukungan teknik dan pengembangan kapasitas. Dalam pedoman yang sama didapat pula bahwa pembangunan berkelanjutan pada jaringan air bersih dan sanitasi layak melalui program Pamsimas mengikutsertakan lintas sektor yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Dinas Kesehatan serta Badan Penyelenggara Pembangunan Daerah yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Berikut adalah strukur umum penyelenggaraan program Pamsimas di Indonesia.

⁷ <https://www.pu.go.id/berita/air-minum-dan-sanitasi> diakses pada 20 Februari 2023

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pelaksanaan Pamsimas



Sumber ; Pedoman Pelaksanaan Pamsimas 2023

Secara teknis dalam pelaksanaan Pamsimas akan diserahkan oleh pemerintah Indonesia kepada masing-masing Kota/Kabupaten di Indonesia. Selain itu Pamsimas yang pada dasarnya merupakan program swakelola, secara keseluruhan diserahkan kepada kelompok masyarakat penerima dengan didampingi oleh tim fasilitator masyarakat (TFM) utusan Provinsi/Kabupaten. Adapun kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menaungi program Pamsimas disebut dengan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAM) yang terdiri dari ketua, sekretaris bendahara, dan beberapa unit kerja yang didampingi oleh tim fasilitator dan tetap dibawah koordinasi pemerintah daerah setempat. Salah satu Pemerintah Provinsi yang menerapkan program Pamsimas ini yaitu Provinsi Sumatera Barat.

Pada Pamsimas pertama yang diselenggarakan Tahun 2008, Sumatera Barat sudah menerapkan program tersebut yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Berikut data penerima program Pamsimas di Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 1. 2
Jumlah Desa atau Nagari Penerima Kota/Kabupaten di Sumatera Barat
Tahun 2017-2019

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kepulauan Mentawai	21	26	43
2	Pesisir Selatan	31	69	70
3	Solok	16	34	95
4	Sijunjung	24	43	83
5	Tanah datar	25	41	94
6	Padang pariaman	54	37	121
7	Agam	29	47	111
8	Lima puluh kota	26	50	89
9	Pasaman	42	32	81
10	Solok selatan	27	20	74
11	Dhamasraya	26	68	75
12	Pasaman barat	28	52	116
13	Kota Padang	-	3	83
14	Kota Sawahlunto	-	-	64
15	Kota Payakumbuh	-	-	13
16	Kota Pariaman	-	-	37
Total		349	522	1.249

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Melalui tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah desa/nagari penerima Pamsimas setiap tahunnya. Salah satu Kabupaten yang mengalami peningkatan signifikan yaitu Kabupaten Pasaman Barat. Peningkatan terjadi ditahun 2018 sebanyak 52 nagari/desa penerima yang kemudian meningkat kembali di Tahun 2019 dengan angka 116 penerima Pamsimas. Dengan diterapkannya program Pamsimas di Kabupaten Pasaman Barat banyak memberi perubahan dan perbaikan dalam sub sektor air minum dan sanitasi masyarakat setempat.

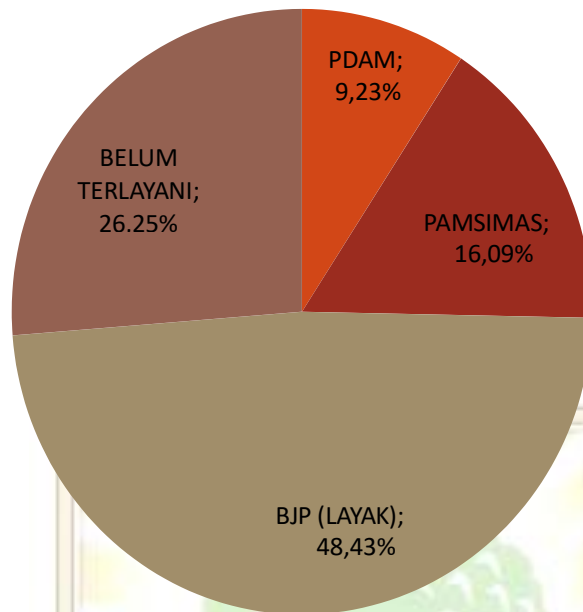
Umumnya, sistem penyediaan air minum di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem air minum yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yaitu PDAM, bantuan pemerintah pusat melalui program SEAB, PNPM, dan Pamsimas. PDAM sendiri belum mampu mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat dan disinyalir juga banyak mendapat keluhan seperti kebocoran air, kualitasnya yang tidak baik, sistem distribusinya yang masih belum efektif dan banyaknya permasalahan lain. Sehingga diadakan program Pamsimas yang bersifat swakelola dengan menggunakan sistem organisasi yang sederhana. Adapun sumber air yang digunakan dalam pembangunannya adalah mata air, sungai, air tanah dalam dan air tanah dangkal. Saluran yang digunakan ialah sambungan rumah (SR), Hidran umum (HU), kran umum (KU) serta bak penampung. Melalui data yang didapat dari Rencana Induk SPAM (RISPAM) tercatat jumlah SR yang dikelola dalam pembangunan Pamsimas sudah mencapai 5.643 unit dan jumlah KU yang dikelola sebanyak 413 titik.

Program ini juga dipayungi oleh Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang menyebutkan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kuantitas dan berkelanjutan. Dalam hal ini salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan sistem penyediaan air minum ialah dengan melihat aksesibilitas dan persebaran yang merata dan berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat⁸.

Kabupaten Pasaman Barat masih belum memenuhi target pelayanan air bersih sesuai SDGs (*Sustainable Development Goals*), yaitu 100% pelayanan air bersih yang layak dari segi teknis dan ekonomis untuk wilayah perkotaan dan perdesaan. Hingga tahun 2016, persentase pelayanan air minum Kabupaten Pasaman Barat masih 73,75% melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Masih ada sekitar 26,25% atau 110.004 jiwa penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air minum secara layak.

⁸ Indikator Kesejahteraan Rakyat. BPS Kabupaten Pasaman Barat. 2022

Gambar 1. 2 Kondisi Eksisting SPAM Kabupaten Pasaman Barat



Sumber : Rencana Induk SPAM (RISPAM) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2028

Dengan cakupan pelayanan SPAM Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. 3
cakupan pelayanan SPAM Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016

No	Kecamatan/ Nagari	Jumlah Penduduk Tahun 2016	Jaringan Perpipaa n								Belum Terlayani	
			PDAM			Pamsimas						
			SR	Jiwa	%	SR	KU	Jiwa	%	Jiwa	%	
1	Sungai Beremas	25.232	-	-	-	64	21	4.322	17,13	11.940	47,32	
	Air Bangis	25.232				64	21	4.322	17,13	11.940	47,32	
2	Ranah Batahan	26.552	-	-	-	594	79	8.773	33,04	5.009	18,86	
	Batahan	19.452				389	67	6.116	31,44	8.058	41,43	
	Desa Baru	7.099				205	12	2.657	37,43	1.713	24,13	
3	Koto Balingka	29.854	-	-	-	169	40	6.808	22,80	3.280	10,99	
	Parit	29.854				169	40	6.808	22,80	3.280	10,99	
4	Sungai Aur	36.250	-	-	-	482	32	3.620	9,99	16.959	46,78	
	Sungai Aur	36.250				482	32	3.620	9,99	16.959	46,78	
5	Lembah Melintang	47.846	348	1.740	3,64	987	30	6.727	14,06	16.152	33,76	
	Ujung Gading	47.846	348	1.740	3,64	987	30	6.727	14,06	16.152	33,76	
6	Gunung Tuleh	21.639	-	-	-	1.472	48	12.509	57,81	4.511	20,85	
	Muaro Kiawai	9.181				364	13	2.746	29,91	2.989	32,56	
	Robi Jonggor	12.458				1.108	35	9.763	78,37	1.522	12,22	
7	Talamau	27.604	858	4.290	15,54	885	111	12.642	45,80	7.256	26,29	
	Talu	8.193	293	1.465	17,88	320	12	2.208	26,95	3.449	42,09	
	Kajai	11.919	565	2.825	23,70	295	64	6.997	58,71	732	6,15	
	Sinuruik	7.492				270	35	3.437	45,88	3.075	41,04	
8	Pasaman	74.673	4.100	20.500	27,45	341	27	4.852	6,50	22.016	29,48	

	Aua Kuniang	22.113	2.050	10.250	46,35	299	23	4.559	20,62	2.086	9,43
	Lingkuang Aua	39.005	2.050	10.250	26,28	42	2	248	0,64	16.602	42,56
	Aia Gadang	13.554				-	2	45	0,33	6.975	51,46

Sumber: Pamsimas Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016

Eksistensi Pamsimas sebagai program pendukung pemenuhan aksesibilitas penduduk terhadap air dapat dilihat melalui tabel yang disajikan diatas diluar jumlah penduduk yang belum terlayani fakta bahwa Pamsimas menjadi strategi pemerintah daerah dalam melancarkan aksi pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak melalui layanan Pamsimas, program ini berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan yang menyeimbangkan antara pemenuhan kehidupan saat ini tanpa membahayakan keadaan lingkungan serta bermanfaat untuk kehidupan generasi yang akan datang.

Dalam pelaksanaannya program Pamsimas juga berorientasi pada perbaikan taraf hidup masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera. Namun, di beberapa nagari/desa persebaran program Pamsimas masih ditemui ketidakberfungsian program tersebut. Berikut adalah data keberfungsian program Pamsimas di Kabupaten Pasaman Barat periode 2008-2020:

Tabel 1. 4
Keberfungsian Sarana Pamsimas di Kabupaten Pasaman Barat Periode 2008-2020

No	Kecamatan	Kondisi SAM		
		Tidak Berfungsi	Berfungsi Sebagian	Berfungsi Baik
1.	Gunung Tuleh	-	5	11
2.	Kinali	-	1	15
3.	Koto Balingka	3	2	15
4.	Lembah Melintang	1	2	11
5.	Luhak Nan Duo	-	-	5
6.	Pasaman	1	-	13
7.	Ranah Batahan	11	3	11
8.	Sasak Ranah Pasisie	-	-	4
9.	Sungai Aur	1	2	14
10.	Sungai Beremas	-	1	4
11.	Talamau	-	2	30
TOTAL		17	18	133

Sumber : Modul Keberfungsian sarana Pamsimas Kabupaten Pasaman Barat Periode 2008-2020

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Ranah Batahan memiliki angka tertinggi untuk pamsimas yang tidak aktif. Sebaliknya Kecamatan Talamau memiliki angka tertinggi dalam keberfungsian pamsimas yang masih berjalan. Dalam hal ini beragam faktor keberhasilan dan kegagalan pamsimas tidak terlepas dari kondisi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan sekitarnya.

Sebelum adanya program Pamsimas, sebagian besar aktivitas masyarakat memanfaatkan sungai sebagai sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan seperti memasak, mandi, membuang air besar/kecil, dan aktivitas lainnya. Sebagai contoh di salah satu Desa di Kecamatan Talamau yaitu Desa Harapan Tinggam. Awalnya masyarakat sangat menggantungkan diri ke sungai ditambah lagi banyaknya anak-anak sungai yang ada di desa tersebut mencukupi kebutuhan masyarakat akan air. Beberapa masyarakat menggunakan sumur bor untuk jenis keluarga mampu mengingat biaya yang dikeluarkan untuk itu tidaklah sedikit. Kondisi tersebut menjadi alasan diusulkannya Pamsimas di Desa tersebut dengan harapan adanya perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat melalui pola hidup yang bersih dan kesadaran mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Namun dalam pelaksanaannya diperlukan pendampingan khusus kepada masyarakat untuk memulai membiasakan diri dengan adanya program Pamsimas ini. Terlebih lagi masyarakat pedesaan yang awam terhadap hal baru di desa mereka. Pada pengimplementasiannya sering kali terjadi kegagalan yang disebabkan kurangnya kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku menuju hidup bersih di beberapa wilayah persebaran Pamsimas. Untuk itu diperlukan upaya pendampingan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program Pamsimas. Sejalan dengan itu Tim Fasilitator Masyarakat

(TFM) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 juga menyebutkan hal serupa dalam wawancara berikut ini⁹.

“Faktor yang menyebabkan tidak berfungsinya program Pamsimas ini yaitu Pertama, dari segi pengelola atau KP-SPAM yang tidak berjalan dengan baik. Kedua, Bencana alam yang tidak dapat dideteksi datangnya. Ketiga, sumber air yang bermasalah atau tidak memadai disuatu wilayah. Keempat, Tidak berjalannya iuran kontribusi masyarakat (IKM) serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga aset nagari juga kesadaran akan hidup bersih yang masih minim”. (Wawancara bersama Bu Ane selaku TFM periode 2017-2020 pada 21 Desember 2022)

Sebagai program yang dirancang dengan basis masyarakat, program ini sangat membutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat untuk keberlanjutan dan pengelolaannya. Dukungan yang dapat dilakukan bisa berupa materi ataupun non materi. Sangat disayangkan ketika program fungsional tersebut tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Pembangunan Pamsimas di danai dari anggaran rupiah murni (APBN, APBD), Pinjaman luar negeri(PLN), APBDes, Iuran Kontribusi Masyarakat (IKM) serta dukungan pendanaan dari sumber non-pemerintah lainnya seperti seperti Corporate Social Responsibility (CSR)¹⁰. Berdasarkan komposisi sumber dana pembangunan Pamsimas, dapat diketahui bahwa keberfungsian Pamsimas cukup bergantung pada iuran kontribusi masyarakat. Kontribusi masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat itu sendiri.

⁹ Wawancara Bersama Ibu Ane, Tim Fasilitator Pamsimas Pasaman Barat, Pada 2 November 2022

¹⁰ Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Pamsimas 2020

Adapun komponen iuran yang dikeluarkan masyarakat dalam bentuk tunai (in-cash) minimal 4% dan tenaga kerja/material (in-kind) sebesar 16%¹¹.

Diketahui pula bahwa kemampuan ekonomi masyarakat dan APBdes tiap daerah berbeda-beda. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Ranah Batahan bermata pencaharian sebagai petani memiliki kondisi ekonomi yang lemah begitupun APBdes/APBnag nya. Praduga bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab tidak aktifnya program Pamsimas juga dibenarkan oleh pengelola keuangan Pamsimas di Desa Sawah mudik, Kecamatan Ranah Batahan dalam wawancara yang dilakukan melalui telephone¹² :

“Masyarakat di desa ini mayoritas sebagai petani. Di desa ini dikelilingi anak sungai yang sekaligus menjadi tempat pemenuhan masyarakat akan air. Masyarakat merasa senang dengan adanya program Pamsimas yang dibangun, namun ketika program itu disosialisasikan dengan pemakaian tarif, masyarakat setempat tidak memiliki jawaban atas itu. Tidak ada kesepakatan antar masyarakat untuk tarif yang digunakan. Beberapa bulan berlalunya program tersebut, fasilitas pamsimas mulai mengalami kerusakan dan sekarang hanya tersisa bak penampung yang tidak terawat dan dibiarkan”. (wawancara bersama Syrna Ayna Yetti selaku bendahara KP-SPAM Sawah mudik pada 22 November 2022)

Pemakaian tarif dalam pembangunan Pamsimas merupakan bentuk biaya operasional dan pemeliharaan jika nantinya fasilitas yang diberikan mengalami kerusakan sekaligus menjadi biaya pemeliharaan. Pasalnya program Pamsimas dibangun untuk masyarakat secara gratis dalam waktu kurang lebih Tiga (3) bulan,

¹¹ Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Program Pamsimas 2020

¹² Wawancara Syrna Ayna Yetti.. Pengelola keuangan pamsimas desa sawah mudik. 22 November 2022

setelah itu program tersebut akan dikenakan tarif yang berbeda tiap-tiap penerima nya serta sesuai dengan kesepakatan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Diluar kendala ekonomi, permasalahan SPAM lainnya di Kabupaten Pasaman Barat menurut data yang didapat melalui analisa konsultan pada Laporan Rencana Induk SPAM berikut ini:

Tabel 1. 5
Permasalahan SPAM/Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat

No	Kecamatan	Nagari	Permasalahan SPAM
1	Koto Balingka	Parit	Sistem pelayanan Pamsimas masih menggunakan KU seluruhnya
			Kualitas air disumur warga berkurang saat hujan
			Mayoritas penduduk menggunakan sumur
2	Lembah Melintang	Ujung Gading	Aliran air PDAM ataupun Pamsimas sering mati
			Sumur masyarakat banyak yang berwarna dan berbau
3	Kinali	Kinali	Kurangnya pembinaan dari fasilitator mengenai pemeliharaan jaringan pipa
			Di Jorong Anam Koto Selatan jaringannya rusak
		Katiagan	Belum masuk Pamsimas ataupun PDAM
		Kajai	Air PDAM tidak bersih
			Air PDAM sering mati, 2 jam/minggu mati
			Di Jorong Pasa Lamo Pamsimas tidak aktif lagi

4	Talamau		Di Jorong Rimbo Batu Pamsimas airnya tidak cukup
		Talu	Manajemen pengelolaan yang kurang
			PDAM terlalu tinggi bayarannya menurut masyarakat setempat
		Di Jorong Patomuan air Pamsimas tidak mengalir	
	Sinuruik		Biaya PDAM yang tinggi mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi kurang
			Di Batas Samuik Jorong Harapan Tinggam air tercemar dan susah mendapatkan air karena elevasidaerah yang tinggi
			Sumber air di Paraman kecil dan distribusi tidak merata
		Di Jorong Benteng dan Tombang PLN belum masuk sehingga mengoperasikan Pamsimas dengan menggunakan pompa biayanya tinggi	
	Pengelolaan Pamsimas belum maksimal		
	Dasar hukum dari walinagari untuk pengelola Pamsimas belum ada		
5	Pasaman	Aia Gadang	Pendanaan masih kurang

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui keluhan yang dirasakan per kecamatan berbeda-beda baik dari aspek pendanaan, lingkungan, permasalahan sosial, tata hukum juga keterlibatan berbagai pihak. Peran unit kerja kesehatan dalam hal ini Puskesmas ditingkat Nagari/Desa sebagai satuan pelaksana Pamsimas juga

memiliki andil dalam permasalahan diatas. Puskesmas memiliki peran sebagai unit yang memberikan promosi kesehatan berupa sosialisasi atau penyuluhan akan pentingnya air bersih dan sanitasi layak dengan output adanya perubahan perilaku masyarakat menuju hidup sehat yang juga ditegaskan dalam petunjuk pelaksanaan Program Pamsimas yaitu sebagai berikut ¹³:

1. Melaksanakan promosi kesehatan dan sanitasi pada masyarakat
2. Memonitor dan membuat laporan tentang pelaksanaan promosi kesehatan dan sanitasi yang dilaksanakan di desa/nagari
3. Bekerjasama dengan guru sekolah dalam pelaksanaan PHS di sekolah
4. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti posyandu, PKK dll dalam pelaksanaan kegiatan PHS dan CLTS di masyarakat
5. Bekerjasama dengan sanitarian dan fasilitator kesehatan dalam pelaksanaan RTL dan monitoring pelaksanaan pencapaian stop BABS

Indikasi belum terlaksananya peran unit kesehatan dalam pembangunan Pamsimas dapat dilihat melalui matriks reviu kinerja tahunan penyelenggaran program Pamsimas Tahun 2020, capaian ataupun output unit kesehatan belum terealisasi sesuai indikator yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang perlu dicapai yaitu pelaksanaan promosi kesehatan pasca pembangunan perihal perbaikan gizi dan pola hidup masyarakat melalui air minum dan sanitasi. Sementara itu pembiayaan ataupun honorarium yang dikeluarkan untuk tenaga ahli

¹³ Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tingkat masyarakat

dalam unit kesehatan dalam Pembangunan Pamsimas terus berlangsung. Kapasitas unit kesehatan sebagai aktor yang terlibat dalam pembangunan Pamsimas seharusnya mampu membentuk perubahan perilaku masyarakat menuju hidup bersih terutama wilayah pedesaan seperti Desa sawah mudik, Kecamatan Ranah Batahan.

Permasalahan lainnya yaitu adanya indikasi rendahnya kualitas sumber daya manusia yang masih menjadi permasalahan pokok dengan isu rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Dijelaskan bahwa air minum dan sanitasi menjadi salah satu akar permasalahan yang mengakibatkan masih rendahnya kualitas SDM tersebut di Kabupaten Pasaman Barat ¹⁴. Sementara itu Sumber Daya Manusia merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan berkelanjutan, diperlukan SDM yang berkualitas sehingga dapat mengatasi stukturisasi permasalahan yang ada.

Masyarakat yang menggunakan air yang tercemar dapat terkena beberapa penyakit misalnya, kolera, diaere, disentri dan demam tifoid. Berikut adalah jumlah penderita penyakit akibat kondisi air di Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2019:

Tabel 1. 6

Jumlah Penderita Penyakit Akibat Kondisi Air Tahun 2019

Jenis penyakit	Jumlah Kasus
Diare dan Gastroenteritis	26.106

¹⁴ RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Gangguan kulit dan Jar Subkutan Ytt	9.628
-------------------------------------	-------

Sumber: PDBA Dinas Kesehatan Pasaman Barat Tahun 2020

Menyikapi banyaknya kasus yang diakibatkan dari kondisi air tersebut, Pamsimas sebagai platform pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi layak berbasis masyarakat menjadi program unggulan yang mendukung Pasaman Barat menuju Kabupaten yang sehat, maju dan sejahtera. Masyarakat yang maju dan sejahtera tercermin dari indikator seperti tingkat kemiskinan yang rendah, penurunan ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah, peningkatan pendapatan masyarakat, pembangunan yang merata dan inklusif, kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan publik, pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan ekologis dan sebagainya¹⁵.

Selain itu tingginya angka kejadian stunting juga menjadi fenomena yang disebabkan oleh salah satunya tidak terpenuhinya kualitas dan kuantitas air bersih di Pasaman Barat. Beragam permasalahan tersebut memunculkan aksi konvergensi dari pemerintah dengan memperbaiki akses terhadap air bersih dan sanitasi masyarakat. Pemerintah daerah tersebut menetapkan langkah-langkah dalam pembangunan sub-sektor air bersih dan sanitasi layak sebagai berikut¹⁶:

- Membuat peraturan daerah

¹⁵ Nurlita Pertiwi. Implementasi Sustainable development di Indonesia, Pustaka Ramadhan, 2017.

¹⁶ Laporan akhir Penyusunan RTBL Kawasan Jalan Utama Kota Simpang Ampek KAB. Pasaman Barat. 2020

- Mengoptimalkan kualitas sumber air yang berasal dari mata air atau air tanah yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat
- Aspek pendanaan yang melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah, masyarakat, maupun swasta
- Membangun prasarana dan sarana pendukung untuk pendistribusian air bersih yang merata dan berkelanjutan
- Memperhatikan tingkat kelayakan pelayanan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan air minum pada seluruh daerah layanan di Kabupaten Pasaman Barat

Untuk mendukung langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah perlu memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM) air minum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No 29/PRT/M/2018 tentang SPM. Pengukuran SPM Sub bidang air minum dilihat melalui persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/kota¹⁷. Dalam hal ini pemenuhan SPM di Kabupaten Pasaman Barat jumlah rumah tangga yang terlayani masih jauh dari bilangan jumlah total rumah tangga yang ada. Penurunan yang signifikan terhadap kinerja pemenuhan SPM ditahun 2020 juga menjadi sorotan

¹⁷ Peraturan Menteri PUPR No 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

pemerintah. Berikut data terkait kinerja pemenuhan SPM air minum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2022:

Tabel 1. 7
Kinerja Pemenuhan SPM Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah total rumah tangga	78.581	78.581	75.668	108.013	87.634
2. Jumlah rumah tangga terlayani	12.806	12.806	30.049	90.826	68.713
SPM Kabupaten Sub air minum(%)	16,30	16,30	39,71	84,09	78,41

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dan Laporan SPM Dinas PUPR Tahun 2018-2022

Dalam pembangunan Pamsimas sumber air menjadi komponen penting yang perlu diperhatikan. Dalam pedoman pelaksanaan Pamsimas juga dinyatakan bahwa daerah yang memiliki sumber air baku menjadi prasyarat wilayah penerima Pamsimas. Kondisi air disuatu wilayah akan menentukan apakah pamsimas bisa dibangun tanpa mengurangi nilai Sumber Daya Alam yang ada. Sementara itu, Desa sawah mudik memiliki permasalahan sumber air yang tidak layak karena mengandung beberapa zat yang membahayakan jika dikonsumsi secara berkelanjutan. Keadaan diperparah karena berkurangnya sumber mata air di Desa tersebut. Adanya pembangunan atau pelebaran jalan yang berdampak pada rusaknya pipa saluran Pamsimas menjadi hambatan tambahan. Di samping itu alternatif sumur bor tidak disarankan karena berisiko dan memakan biaya yang besar. Upaya pemerintah dalam menjaga sumber daya alam termasuk lingkungan

sebagai sasaran pembangunan pamsimas dalam hal ini perlu memperhatikan aspek ekologis sebagai bentuk perlindungan terhadap endemitas sekitar sehingga tidak membahayakan alam dan lingkungannya¹⁸.

Selaras dengan itu dalam Riset yang dilakukan oleh Azmir pada Tahun 2022 dengan judul “Evaluasi dan Strategi Program Pamsimas di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi” mendapati hasil bahwa sumber air baku secara kuantitas dan kualitas sangat mempengaruhi keberlangsungan ataupun distribusi air dalam program Pamsimas. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber air baku dapat dilakukan dengan cara pelestarian kawasan lindung secara terpadu guna menjaga siklus air.

Pembangunan dari program Pamsimas berlangsung secara terus menerus atau berlanjut sampai saat ini dengan beberapa perubahan baik teknis ataupun sumber dananya. Dengan beragam permasalahan dan fenomena yang timbul, peneliti tertarik membahas kondisi air bersih dan sanitasi di Pasaman Barat. Penelitian ini secara lebih spesifik akan membahas terkait bagaimana pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development jaringan air bersih melalui program yang disediakan pemerintah daerah yaitu penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat/Pamsimas di Kabupaten Pasaman Barat dengan fokus wilayah penerima Pamsimas yang sudah tidak aktif yaitu Kecamatan Ranah Batahan serta wilayah penerima pamsimas yang masih aktif di Kecamatan Talamau.

¹⁸ Silalahi, Daud. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Ekonomi dan Sosial*. 2014

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, dapat disusun perumusan masalah yaitu Bagaimana Sustainable Development jaringan air bersih dan sanitasi layak melalui Program Pamsimas di Kabupaten Pasaman Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu menganalisis dan mendeskripsikan Pembangunan berkelanjutan jaringan air bersih dan sanitasi layak di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan dengan adanya program Pamsimas.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik bagi penulis maupun pembaca terkait pengetahuan bagaimana mewujudkan dan memaksimalkan suatu sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang baik di masyarakat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini memberikan manfaat teoritis sebagai berikut

- ✓ Memperkaya kajian ilmu di ranah Administrasi Publik terutama pada fokus Pembangunan Berkelanjutan

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai berikut

- ✓ Bagi pemerintah, sebagai pedoman untuk meningkatkan capaiannya terkait program-program air minum yang terpadu dan berkelanjutan serta menjadi pertimbangan untuk menetapkan prioritas pembangunan pelayanan air minum di KAB. Pasaman Barat dalam rangka pembangunan berkelanjutan
- ✓ Bagi masyarakat, digunakan untuk mengetahui pentingnya menegakkan hidup sehat didukung dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak yang berkualitas secara berkelanjutan melalui Program Pamsimas.
- ✓ Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat menambah wawasan terkait pelaksanaan Program Pamsimas dan pengetahuan terkait pembangunan yang berkelanjutan serta bentuk implementasi antara teori yang didapat pada saat perkuliahan dengan fenomena yang diteliti.

